

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Amerika Serikat dan Meksiko merupakan dua negara di benua Amerika yang kerap kali dihadapkan pada masalah perbatasan. Perbatasan antara Amerika Serikat dan Meksiko membentang 3.145 kilometer (1.954 mil), dari Teluk Meksiko ke Samudra Pasifik. Salah satu daerah perbatasan yang paling kuat dibentengi untuk memisahkan daerah perkotaan San Diego, di negara bagian California AS, dan Tijuana, di negara bagian Baja California di Meksiko. Perbatasan tersebut ditujukan untuk mengurangi migrasi yang berasal dari Meksiko ke Amerika Serikat (Paula Cabrera, 2013). Sungai Rio Grande dan dataran berbatu di sekitar sungai berfungsi sebagai penghalang alami, atau menjadi tanda perbatasan kedua negara tersebut (Almond, 2020). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut ini:

Gambar 1.1: Peta Pertbatasan antara Amerika Serikat dan Meksiko oleh sungai Rio Grande



Sumber :

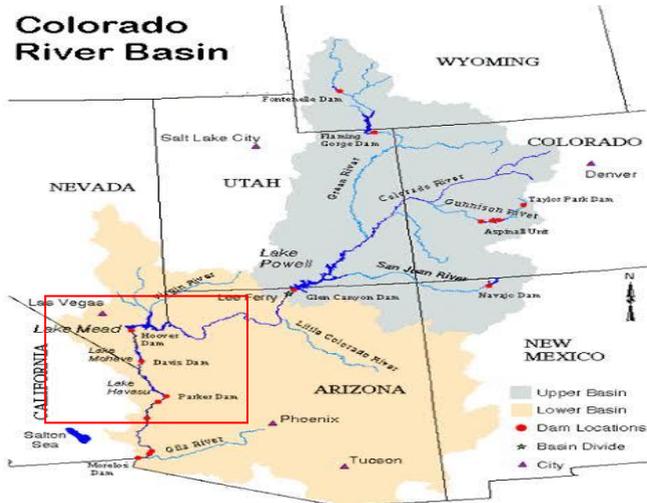
<https://www.mapsofworld.com/answers/travel/amazing-man-made-islands/>

Berdasarkan gambar diatas dapat terlihat jelas bahwa kedua negara tersebut dibatasi oleh perairan internasional sungai Rio Grande dan Sungai Colorado. Sumber daya alam seperti air, minyak, mineral dsb, menjadi sebuah isu yang cukup penting bagi hubungan diplomatik antara kedua negara tersebut. Kemungkinan konflik, bahkan perang, yang dipicu oleh perselisihan regional maupun internasional mengenai kontrol dan akses terhadap sumber daya alam tertentu dapat terjadi. Beberapa konflik yang pernah terjadi karena sumber daya alam seperti berlian terjadi di Liberia, Sierra Leone, Russia, dan Angola (Ross, 2004). Sebagai kebutuhan dasar manusia, air juga menjadi sumber daya alam yang dapat menyebabkan konflik seperti yang terjadi di Sungai Jordan, Nil, Indus, Sungai Mekong, Tigris dan Eufrat (Peter Gleick, 2018). Air sebagai sumber daya alam yang dapat diperbaharui, menjadi langka karena permintaan yang meningkat. Pada saat yang sama, ekosistem yang menghasilkan air bersih telah berubah, maupun dirusak, akibat pencemaran yang disebabkan oleh sistem perkotaan dan pertanian komersial (Cortez Lara, 2005). Hal tersebut juga terjadi di Rio Grande, baik kerusakan yang disebabkan oleh kekeringan maupun imbas dari perkembangan sistem perkotaan dan pembangunan kota disekitarnya beberapa abad terakhir (Alcantara, 2018).

Pada akhir 1800-an, kekeringan yang melanda kedua negara tersebut menyebabkan pengguna air di kedua negara tersebut saling menuduh satu sama lain (Poulsen, 2007). Pada saat yang sama, pembangunan yang terjadi di wilayah sungai Rio Grande dan Colorado mendorong para pemangku kepentingan di kedua negara melakukan kesepakatan distribusi air. Untuk merespon pertumbuhan populasi yang meningkat di kedua perbatasan tersebut, kedua negara menandatangani perjanjian yang mengatur tentang *water sharing* pada 1 Maret 1906. Konvensi mengenai kerjasama bilateral *water sharing* sungai Rio Grande yang bertujuan untuk irigasi di sekitar El Paso. Konvensi tersebut berkembang menjadi sebuah *water treaty* pada tahun 1944. Perjanjian tersebut didesain untuk menetapkan *International Boundary and Water Commission*

(IBWC), yang memiliki tanggung jawab dalam memberikan solusi, serta memfasilitasi permasalahan air yang timbul di kedua belah negara. Perjanjian itu menetapkan bahwa Amerika Serikat berhak menerima 350.000 *acrefeet* setiap tahun dari air yang mencapai Rio Grande tidak boleh kurang (Sánchez, 2006). Amerika Serikat juga harus mengirim 1,5 juta *acrefeet* air melintasi perbatasan setiap tahun, melalui Sungai Colorado (Snider, 2016). Pada 2007, dibawah Perjanjian 1944 Meksiko setuju untuk menyimpan airnya di *resevoir* (waduk) Danau Mead milik Amerika Serikat. Untuk mengontrol level air serta memastikan pemasokan air dikedua negara tersebut demi menghindari konflik (Zaragovia, 2012).

Gambar 1.2 Lokasi waduk Danau Mead



Sumber :

http://www.havasuwatersavers.org/lake_havasu_city_water_resources.php

Sejak 2011, saat krisis air menempati 5 resiko utama yang pada Forum Ekonomi Dunia serta dampaknya menjadi daftar yang selalu ada setiap tahunnya. Selain itu, krisis air menjadi salah satu pendorong terjadinya konflik karena kelangkaan

sumber daya. Sebagai sumber daya yang dibutuhkan semua orang, air cenderung menjadi suatu hal yang politis dalam momen tertentu. Dalam beberapa tahun belakangan kesadaran tentang krisis air mempengaruhi stabilitas politik nasional maupun internasional. Saat ini, cadangan air bawah tanah terbesar di dunia seperti Afrika, Eurasia dan Amerika sedang dalam tekanan, dan diprediksi tidak berkelanjutan (Anderson, 2016). Karena hal tersebut munculah *hydrodiplomacy* pada *World Water Week* di Stockholm pada 2014. *Hydrodiplomacy* dapat didefinisikan sebagai mengangkat isu air menjadi kebijakan luar negeri, bantuan, maupun agenda *sustainability* air dengan ruang lingkup yang lebih luas seperti stabilitas suatu wilayah. Hasil dari diplomasi ini berupa kerjasama *water transboundary* berguna untuk menyediakan air minum, irigasi, tenaga air, agrikultur, ketahanan pangan, dan keamanan air (Wolf L. T., 2017).

Pada 2013 kekeringan akibat *climate change* yang melanda Amerika Serikat dan Mexico menjadi masalah yang menyebabkan perselisihan hubungan kedua negara tersebut. Texas Selatan yang bergantung pada sungai Rio Grande harus menjadi korban pemotongan pasokan air. Kegagalan Meksiko untuk mengirimkan pasokan air yang seharusnya sesuai dengan *water treaty* 1944 memperburuk kekeringan. Untuk siklus lima tahun dimulai sejak 25 Oktober 2010 hingga 24 Oktober 2015. Meksiko tidak mampu untuk memenuhi target yaitu 1.750.000 *acre feet* air. Selama 3 tahun berjalan, pada 20 Juli 2013, Meksiko hanya mengalihkan 487.208 *acre feet* air. Karena Meksiko belum memenuhi persyaratan ini selama 3 tahun terakhir, Amerika memiliki pandangan bahwa Meksiko melanggar perjanjian. Dilain sisi, Meksiko beranggapan bahwa 350.000 *acre feet* air dipenuhi dalam 5 tahun maka mereka tidak melakukan pelanggaran (Dowell, 2013).

Sengketa air menjadi isu *high politics* pemerintah Amerika Serikat dan Meksiko pada tahun 2013. Hal tersebut dikarenakan sengketa air telah menjadi topik pembicaraan yang sering muncul antara para elit negara seperti negara bagian Texas (Carter, 2013). Pada 2-4 Mei 2013 Presiden Obama bertemu

dengan Presiden Enrique Peña Nieto untuk membahas beberapa isu yang terjadi diantara keduanya seperti ekonomi, politik, keamanan, lingkungan dan hubungan pribadi antara Amerika Serikat dan Meksiko (Sabatini, 2013). Pada Juli 2015 dibawah administrasi Obama, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat mengangkat isu sengketa air dalam pertemuan dengan pemerintah Mexico berdasarkan komplain dari Texas serta Mexico's *National Water Agency*. Negosiasi yang dilakukan berupa pembahasan upaya pemodelan cekungan air untuk meningkatkan produksi air serta ketepatan pengiriman air dari Meksiko (Nicole T. Carter S. P., U. Mexican Water Sharing: Background and Recent Developments, 2017).

Perjanjian *water sharing* siklus lima tahunan tersebut berakhir pada akhir 2017. Perlu diadakannya negosiasi ulang dibawah administrasi Trump. Saat kampanyenya Presiden Trump berjanji untuk menyelesaikan permasalahan air untuk mengembalikan pekerjaan. Namun, setelah Trump menang tidak ada pembahasan mengenai isu air tersebut (Snider, 2016). Pada 31 Januari 2017 Presiden Enrique Peña Nieto akan mengunjungi Trump untuk membahas perdagangan, imigrasi, dan keamanan. Presiden Peña Nieto mengirimkan para diplomatnya untuk membahas pertemuan tersebut. Namun, di waktu yang hampir bersamaan, Presiden Trump mendesak untuk menandatangani perintah eksekutif yang menyerukan pembangunan tembok fisik di perbatasan Selatan untuk menghentikan migrasi ilegal dari Meksiko. Hal tersebut menyebabkan kemarahan para diplomat serta Presiden Peña Nieto secara emosional di televisi negaranya mengecam perintah eksekutif Trump dan mengatakan Meksiko tidak akan membayar untuk dinding apa pun (Lizza, 2017).

Dalam diplomasi twitternya Presiden Trump mengunggah cuitan akan membatalkan pertemuan dengan Peña Nieto. Oleh karena itu tidak mengherankan kunjungan Peña Nieto dibatalkan dan tidak ada pembahasan apapun mengenai isu air. Lembah Sungai Colorado yang semakin mengering permukaan air Danau Mead (sebagai parameter persediaan air) yang turun drastis mengancam 40 juta jiwa terutama para petani (Snider,

2016). Membangun dinding perbatasan akan menambah komplikasi lebih lanjut. Mirip dengan banyak perbatasan AS-Meksiko, wilayah perbatasan di sepanjang Sungai Rio Grande memiliki komunitas yang berdekatan satu sama lain. Beberapa perbatasan di lembah Sungai Rio Grande sudah memiliki dinding dan pagar (Richards, Center For American Progress, 2017). Selain itu, dinding ini sendiri dapat membatasi aliran air yang penting bagi kota di kedua sisi perbatasan. Ini dapat memperburuk polusi air dan menyebabkan bencana banjir. Mungkin juga mengubah pengisian air tanah di daerah yang diisi oleh sungai (Weiser, 2017).

Pengelolaan Rio Grande adalah masalah yang penting serta mendesak, keamanan air di lembah tidak boleh diabaikan. Persediaan air yang mulai menipis menjadi taruhan kedua negara dalam melanjutkan perpanjangan lima tahun *water transboundary* pada administrasi Obama. *Water transboundary* berubah dramatis di bawah administrasi Trump yang memiliki kebijakan "*America First*". Pembangunan tembok fisik hanya akan merusak ekosistem sungai dan menyebabkan polusi air di sungai Rio Grande. Di saat yang sama Amerika Serikat membutuhkan supply air dari Mexico untuk memenuhi kebutuhan warga negaranya serta menjalankan perekonomian melalui *hydrodiplomacy* dengan Mexico. Namun, Trump bersikeras untuk merealisasikan kebijakan *America First*nya. Hubungan Amerika Serikat dan Meksiko sedang menghadapi fase ketidakpastian. Karena pembatalan pertemuan antara Trump dengan Peña Nieto, serta pembangunan dinding perbatasan untuk mencegah imigran menyebabkan peningkatan tensi pada hubungan keduanya. Selain itu, perubahan iklim yang memperparah kekeringan menjadi taruhan keberlanjutan *hydrodiplomacy* antara kedua negara tersebut dibawah keterikatan *water treaty* 1944.

Isu tentang air dalam hubungan Amerika Serikat dan Meksiko telah banyak didiskusikan, diantaranya adalah oleh Ursula Oswald Spring dalam penelitiannya yang berjudul ***Hydro-diplomacy: Opportunities for Learning an***

Interregional Process membahas tentang kelangkaan air, pengelolaan serta majemennya di berbagai regional salah satunya Amerika Serikat dan Meksiko. Penelitian ini menggunakan kerangka berpikir *hydro diplomatic negotiations* dalam global geopolitik untuk memamanajemen kelangkaan air di suatu wilayah. Kemudian, Margaret Wilder, Robert Varandy, Steve Mumme, dkk dalam US-Mexico ***Hydrodiplomacy: Foundations, Change, and Future Challenges***, penelitian ini membahas tentang *hydro diplomacy* antara Amerika Serikat dan Meksiko sebagai bentuk preventif dari konflik serta menjaga sustainability air di wilayah tersebut. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *science diplomacy (hydro diplomacy)* pada perairan lintas negara. Diplomasi ini sebagai bentuk kolaborasi sains dan politik demi masa depan untuk mengantisipasi ketegangan internasional akan konflik atas air. Kedua penelitian diatas berfokus mengenai hydrodiplomacy sebagai upaya menjaga keamanan air dan tindakan pencegahan konflik. Sedangkan, dalam penelitian skripsi ini, penulis mencoba untuk meneliti *hydrodiplomacy* dari sisi Amerika Serikat dengan menggunakan kerangka pemikiran *Populis Securitization* dan Realisme yang sebelumnya belum pernah digunakan maupun diteliti.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan inti permasalahan penelitian, yaitu “Mengapa Donald Trump Memberlakukan kebijakan *America First*nya dengan membangun tembok di perbatasan meskipun berdampak pada *hydrodiplomacy* Amerika Serikat dan Meksiko ?”

C. Kerangka Pemikiran

Populis Securitization

Salah satu perkembangan yang menonjol dalam dunia politik beberapa tahun belakangan ini adalah kemunculan populis di seluruh dunia. Populisme merupakan suatu ideologi yang membagi dua kelompok, yaitu kelompok

homogen “*the pure people*” atau rakyat melawan kelompok antiagonis “*the corrupt*” yang diidentifikasi sebagai elitisme dan pluralisme. Populisme berpendapat bahwa politik seharusnya mengekspresikan *volonte generale* (keinginan umum) rakyat (Mudde, 2004). Populisme juga dianggap sebagai gaya politik. Gaya politik tersebut berfokus pada elemen populisme berupa seruan kepada rakyat mengenai persepsi tentang krisis, kehancuran, dan ancaman dengan menggunakan bahasa politik yang kasar atau perilaku buruk. Populisme juga erat dengan gagasan “kita” melawan “mereka” (Moffitt, 2014).

Saat populis mengambil alih kekuasaan eksekutif dan legislatif, implikasi kenaikan para populis menjadikan ketidakstabilan bagi konstelasi politik internasional. Selain itu partai populis juga dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri (Zaslove, 2015), menggiring opini publik saat menjadi pihak oposisi. Pemilihan pemimpin populis serta pembentukan pemerintahan yang populis akan memberikan dampak langsung terhadap kebijakan luar negeri serta pada politik internasional (Sandra Destradi, 2019). Kebijakan populisme kemudian dikonseptualisasikan sebagai suatu bentuk strategi politik yang digunakan oleh seorang pemimpin personalistik yang mencari atau menggunakan kekuasaan pemerintah berdasarkan dukungan langsung, tidak dilembagakan dari sebagian besar pengikut yang sebagian besar dan tidak terorganisir (Weyland, 2001).

Para pemimpin negara populis dipilih oleh para nasionalistis dengan asumsi bahwa mereka akan menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas utama dibandingkan kepentingan lainnya. Para pemimpin populis melihat dari aspek keuntungan untuk mereka dalam kerjasama regionalisme maupun multilateralisme kurang dari apa yang akan diperoleh oleh negara lain serta warga negaranya, para pemimpin tersebut akan dipaksa untuk menjauh dari perjanjian (Taliaferro, 2006). Alasan penggunaan pendekatan realis terhadap hubungan internasional pada era kenaikan populisme ini adalah bahwa popularitas serta relevansi para pemimpin populis yang *sustainability* dalam politik domestiknya. Hal tersebut sangat

dipengaruhi oleh kapabilitas mereka untuk meyakinkan rakyat bahwa strategi kebijakan luar negeri yang dirancang bertujuan untuk mengamankan kepentingan nasionalnya..

Magcamit, (2017) mengatakan para pemimpin populis menggunakan populisme sebagai tindakan sekuritisasi agar memungkinkan mereka menciptakan serta menerapkan kebijakan luar negeri yang realis. Dapat dikatakan bahwa sekuritisasi populis adalah platform untuk kebijakan luar negeri realis dikembangkan, dijalankan, serta dirasionalisasikan. Menghadirkan isu-isu domestik sebagai ancaman eksistensial bagi kelangsungan hidup negara. Diangkatnya isu-isu ini di luar yurisdiksi politik biasa ke dalam lingkup darurat politik, sehingga mereka dapat menangani hal tersebut tanpa aturan serta prosedur pembuatan kebijakan luar negeri yang demokratis atau dapat dikatakan sebagai tindakan luar biasa (Li, 2015).

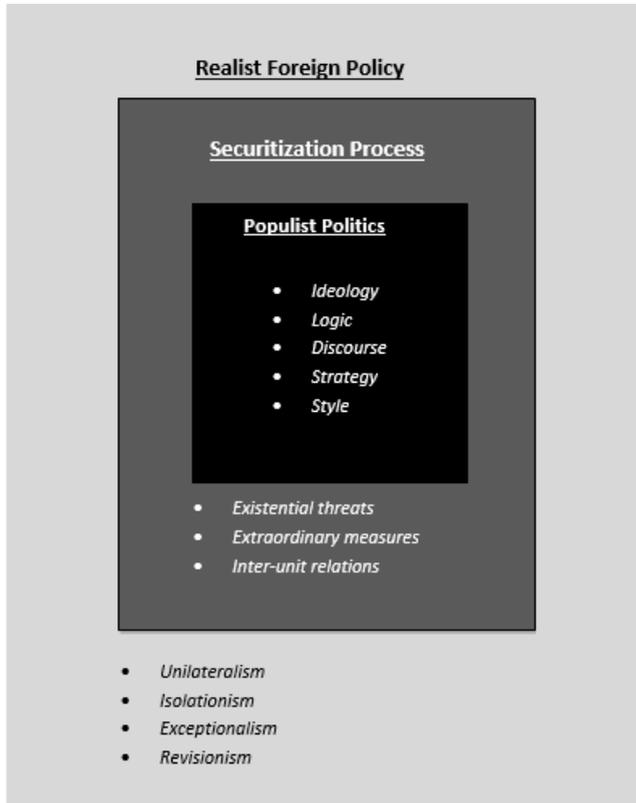
Para pemimpin populis dapat melakukan eksploitasi kekuatan darurat yang dihasilkan oleh sekuritisasi dalam pembuatan dan menjual kebijakan luar negeri realis mereka. Di sisi yang lain, peran dari masyarakat sangat diperlukan, dengan memberikan dukungan moril terhadap pemimpin populis untuk menerima sekuritisasi masalah yang disajikan sebagai ancaman eksistensial oleh para pemimpin populis (Magcamit, 2017). Menurut Roe, (2008) sejauh ini tindakan sekuritisasi terdapat dua tahap yang berbeda yaitu tahap identifikasi dan tahap mobilisasi. Artinya bahwa sementara identifikasi atau pelabelan keamaan (sekuritisasi retorik) merupakan bagian instrisik dari prosesnya, namun keberhasilan maupun kegagalan suatu langkah sekuritisasi juga ditentukan oleh kapabilitas pemimpin populis untuk memobilisasi dan menerapkan prosedur luar biasa yang mereka tawarkan (sekuritisasi aktif).

Populis politik yang dianut oleh Trump menjadi motivasi untuk melakukan tindakan sekuritisasi maupun tindakan luar biasa terhadap suatu isu yang dianggap mengancam negara dan rakyatnya diartikulasikan dalam bentuk uniletarisme, isolasionisme, pengecualian, dan revisionisme pada sebuah kebijakan luar negeri realis (Magcamit, EXPLAINING THE

THREE-WAY LINKAGE BETWEEN POPULISM SECURITIZATION, AND REALIST FOREIGN POLICIES : President Donald Trump and the Pursuit of "America First" Doctrine, 2017). Para pemimpin populis selalu mengklaim, berbicara serta bertindak mengatasnamakan rakyat, dan dari rakyat itulah populisme mendapatkan kekuatan retorikanya. Strategi populis adalah mengidentifikasi kelompok yang dianggap sebagai musuh negara. Populis biasanya menyerang pihak-pihak social yang dianggap menentang kepentingan dan kesejahteraan dari *the pure people*. Ada dua segmen masyarakat yang dipilih oleh pemimpin populis yaitu para elit dan kelompok minoritas. Kaum elit yang terdiri dari industriawan, bankir, dan politisi sedangkan kelompok kedua yaitu imigran, feminis atau pengangguran (Taggart, 2000).

Para pemimpin populis menggunakan populisme politik sebagai tidakan sekuritisasi yang dapat membenarkan keputusan mereka untuk merancang kebijakan luar negeri. Hal tersebut dapat dilihat pada salah satu pemimpin populis dari Negara *superpower* Presiden Donald J. Trump dari Amerika Serikat (Rooduijn, 2014). Terdapat hubungan tiga arah antara populis, sekuritisasi, dan realisme yang memberikan petunjuk terhadap perumusan kebijakan Amerika Serikat dapat dilihat pada diagram dibawah ini.

Gambar 1.3: Hubungan tiga arah antara Populisme, Sekuritisasi, dan Realisme



Sources : (Magcamit, EXPLAINING THE THREE-WAY LINKAGE BETWEEN POPULISM SECURITIZATION, AND REALIST FOREIGN POLICIES : President Donald Trump and the Pursuit of“America First” Doctrine, 2017)

Magcamit, (2017) berpendapat bahwa Trump melakukan sekuritisasi keamanan Amerika Serikat secara bersamaan dengan eksploitasi berbagai fungsi populisme politik saat melakukan pidato dan merumuskan tindakan darurat. Penetrasi fungsi ideologis, logis, diskursif, stategis dan gaya politik populis Trump mampu meyakinkan para audiensnya untuk mendukung tindakan luar biasa yang ia tawarkan yang diyakini sebagai ancaman eksistensial terhadap ekonomi Amerika

Serikat. Trump mengkategorikan ancaman yang dapat berkembang menjadi krisis dan berdampak pada kelumpuhan total ekonomi Amerika Serikat jika dibiarkan tidak terkendali. Seperti pencurian pekerjaan oleh para imigran tidak berdokumen dan memiliki tendensi terorisme (Bonikowski, 2016).

Oleh karena itu strategi argumentasi yang digunakan untuk meyakinkan audiens tentang kebenaran beberapa klaim yang disampaikan kembali dengan versi pemimpin populis yang saling berhubungan dikenal dengan topoi (Demata, 2017). Meyakinkan melalui praktik diskriminatif atas dasar wacana rasis populis yang efektif tentang penyebab merosotnya ekonomi Amerika Serikat yang menargetkan imigran memiliki peranan penting dalam pengembangan kebijakan luar negerinya. Saat Trump mengatakan “*America First*”, ia memiliki pendapat bahwa tanggung jawab kedaulatan Amerika Serikat mengesampingkan komitmennya terhadap multilateralisme (Luck, 2003).

Kebijakan luar negeri Amerika Serikat di bawah Trump, menimbulkan serangkaian konsekuensi yang mengkhawatirkan seperti melemahnya komitmen terhadap institusi multilateral. Meningkatnya kegagalan dalam penyediaan barang publik global di bidang-bidang penting, dari mitigasi perubahan iklim hingga pengurangan kemiskinan. Menjamurnya perselisihan internasional karena pendekatan agresif terhadap politik internasional serta meningkatnya ketidakpastian dalam politik dunia karena gaya kepemimpinan pemimpin populis yang impulsif. Presiden Donald J. Trump merumuskan kebijakan luar negerinya melalui proses sekuritisasi populis, gagasan populisme politik digunakan dalam merasionalisasi dan memantapkan strategi kebijakan luar negeri realisnya yang relevan dengan lesunya perekonomian Amerika Serikat saat itu. Melihat bagaimana Trump mencirikan target, perilaku, dan argumentasi yang memperkuat wacana itu. Terlihat jelas bahwa sebagian besar retorikanya secara ideologis masuk ke dalam populisme. “*Politics of fear*” dalam bahasa tentang imigrasi dan

penekanannya pada kontrol perbatasan sebagai topik wacana untuk menciptakan identitas “*otherness*” bagi para imigran dalam hubungan perbatasan negara.

Bagi Trump, rasa memiliki kebangsaan yang melekat pada konsep perbatasan selalu disertai dengan serangkaian strategi diskursif yang mengesampingkan “*other*”. Sebuah bangsa mengelola proses identitas dan perbedaan (Wodak, 2014), dan inilah inti dari narasi populisme, yang membangun peran yang berlawanan melalui konstruksi mengenai “*us*” atau yang diwakili dan “*other*” sebagai pihak musuh atau yang dikucilkan. Perbatasan adalah tempat di mana rasa identitas nasional dikonstruksi dalam pengertian perbedaan dari yang lain dan di mana perbedaan dalam hal identitas nasional (Michèle Lamont, 2002)

Jika diaplikasikan pada fenomena ini, Trump menerapkan kebijakannya meskipun berdampak pada *hydrodiplomacy* diantara keduanya dikarenakan kebijakan tersebut adalah sekuritisasi perekonomian Amerika Serikat pada saat itu. Pada awal administrasinya, sekitar 800.000 orang ditangkap karena masuk secara ilegal. Selain itu juga, hampir 600.000 orang ditahan karena visa mereka yang *overstayed* (Gomez, 2019). Trump mengklaim para imigran memanfaatkan kesempatan, keistimewaan dan kebebasan yang dimiliki oleh Amerika Serikat tanpa izin resmi dari pemerintah. Para imigran dianggap mengambil lapangan pekerjaan yang seharusnya ditujukan bagi rakyat Amerika.

Hal tersebut didasarkan pada angka pengangguran sebesar 4,3% atau 3,3 juta orang yang terjadi di Amerika Serikat pada saat itu, imbas *great recession* pada masa Obama. Wacana Trumpian itu mendapatkan dukungan dari 51% responden yang setuju dan percaya bahwa imigran mengambil pekerjaan bagi orang Amerika, serta menghabiskan *public benefits* rakyat Amerika Serikat (Kohn, 2016). *National Academies* menemukan bahwa para imigran menghabiskan lebih banyak

uang pemerintah dibandingkan dengan penduduk asli. Para imigran menciptakan deficit fiskal dan membebankan para pembayar pajak Amerika sebesar 296 miliar *Dollar* pertahun (Valverde, 2018). Alasan- alasan tersebut yang digunakan Trump untuk mengesampingkan komitmennya terhadap *hydrodiplomacy* demi menempatkan perekonomian negaranya pada prioritas pertama. Trump membangun tembok sebagai upaya meningkatkan pertahanan, menyediakan dan memperkuat keamanan di negaranya terutama pada bagian perbatasan. Trump merujuk pada data *Immigration and Customs Enforcement* sebagai lembaga menetapkan imigran dan catatan criminal sebanyak 66% atau 266.000 imigran dengan catatan kriminal baik penyerangan, kejahatan seks, maupun pembunuhan dengan kekerasan (Kight, 2019).

Selain itu, 90% heroin ditransaksikan di perbatasan Amerika Meksiko seperti yang diklaim Trump (Bailey, BBC, 2019). Trump menuduh Meksiko mengirimkan orang-orang yang bermasalah ke negaranya seperti *rapist, criminals, drug dealers* yang hanya membawa masalah di Amerika. Melalui persuasi politiknya Trump meyakinkan pendukungnya bahwa kebijakan *America First* dengan pembangunan tembok akan membantu dan menghentikan arus imigran yang merugikan serta meminta Meksiko untuk membayarnya. Trump menganggap Meksiko mengirimkan *rapist, criminals, drug dealers* untuk mendongkrak perkembangan ekonomi negaranya (REILLY, 2016). Meksiko dianggap sebagai pesaing bagi negaranya, maka melalui *America First* Trump memperketat system keamanan negara di perbatasan tanpa memperhitungkan hubungan *water transboundary* yang mendesak serta berdampak keberlanjutan akses air di Rio Grande karena pembangunan tembok fisik.

D. Hipotesa

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan bahwa Donald Trump menerapkan kebijakan *America First*nya

dengan membangun tembok diperbatasan meskipun berdampak pada *hydrodiplomacy* Amerika Serikat dan Meksiko, karena:

“Menghentikan arus imigrasi melalui sekuritisasi ekonomi dan meningkatkan keamanan di perbatasan.”

E. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan mengapa Donald Trump memberlakukan kebijakan *America First* dengan membangun tembok diperbatasan meskipun berdampak pada *hydrodiplomacy* Amerika Serikat dan Meksiko.
2. Membuktikan bahwa alasan Donald Trump memberlakukan kebijakan *America First* dengan membangun tembok diperbatasan meskipun berdampak pada *hydrodiplomacy* Amerika Serikat dan Meksiko merupakan sekuritisasi ekonomi Amerika dan untuk meningkatkan keamanan Amerika Serikat dari ancaman di perbatasan.

F. Jangkauan Penelitian

Untuk efektivitas penelitian dan menghindari pembahasan yang terlalu luas, penulis membatasi jangkauan penelitian. Pada penelitian ini, penulis berfokus pada permasalahan dan alasan Donald Trump memberlakukan menerapkan kebijakan *America First* yang berdampak pada *hydro diplomacy* Amerika Serikat dan Meksiko selama masa jabatan. Presiden Donald J. Trump di awal pemerintahan (2017).

G. Metodologi Penelitian

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah kualitatif. Kualitatif yang berarti pengumpulan serta pengolahan tidak berdasarkan angka namun, didasarkan pada analisis sumber data yang didapatkan. Dalam mencari serta mengumpulkan informasi berdasarkan judul tersebut melalui literatur serta *online research*. Yaitu pencarian dan pengumpulan data melalui membaca maupun mempelajari sumber-sumber referensi baik buku, jurnal, artikel online yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Jenis data yang diaplikasikan berupa data sekunder dari literatur seperti

buku, jurnal ilmiah, media cetak, dan situs daring. Penelitian ini menggunakan teknik analisis eksplanatif yang berarti penelitian ini mencari alasan mengapa suatu fenomena terjadi menggunakan data-data yang diperoleh. Data-data tersebut akan dianalisis menggunakan teori agar dapat menemukan hubungan antar fenomena tersebut.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulis akan memilah bentuk penelitian menjadi empat bab untuk menjelaskan topik penelitian ini yang berjudul **“Alasan Donald Trump Memberlakukan Kebijakan *America First* Yang Mempengaruhi *Hydrodiplomacy* Amerika Serikat dan Meksiko”**

BAB I merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, metode penelitian, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II akan menerangkan mengenai perkembangan *water sharing* yang dilakukan oleh kedua negara tersebut. Selain itu, penulis akan membahas berdirinya *International Boundary and Water Commission (IBWC)*, imigran Meksiko, dan kebijakan *America First*.

BAB III merupakan Bab yang membahas tentang Alasan Donald Trump membangun tembok di perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko.

BAB IV merupakan Bab penutup yang berisi rangkuman dari penjelasan pada bab-bab sebelumnya yaitu berupa kesimpulan.